



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Maret 2021

Halaman: 2

Pemkot Putuskan Tak Refocusing

Silpa APBD 2020 Masih Ratusan Miliar Rupiah

JOGJA, Radar Jogja - Saat daerah lain dipusungkan dengan *refocusing* APBD 2021, Pemkot Jogja memilih tak melakukannya. Seperti halnya tahun lalu. Struktur anggaran, telah mengakomodasi berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadri Renggono mengatakan, alokasi APBD Kota Jogja untuk penanganan Covid-19 sudah terstruktur di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk alokasi untuk pemulihan ekonomi. "Kemarin kami putuskan untuk tidak melakukan *refocusing* anggaran," katanya kemarin (11/3).

Kadri menjelaskan, kegiatan penanganan Covid-19 tidak akan terpusat pada satu instansi saja. Melainkan tersebar di berbagai OPD sesuai dengan kegiatan yang diampu. Manakala ada kebutuhan yang mendesak dan belum dialokasikan melalui APBD, maka masih ada pos biaya tidak terduga yang besarnya mencapai Rp 13 miliar. "Apalagi status pandemi Covid-19 di DIJ saat ini masih tanggap darurat, jadi pencairan biaya tidak terduga bisa lebih cepat," ujarnya.

Di samping itu *cash flow* anggaran juga masih bisa diampu melalui sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2020 lalu. Besaran silpa tahun lalu mencapai ratusan miliar rupiah. "Semua kegiatan

tetap bisa berjalan sesuai dengan hasil pembahasan anggaran," jelas Kadri yang mengklaim tidak ada sanksi bagi daerah yang tidak melakukan *refocusing* APBD.

Sebelumnya, merujuk Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 terkait penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah, terdapat sejumlah *refocusing*. Terutama berkaitan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). *Refocusing* tersebut menyangkut penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka Pemberlakuan



Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Khusus DAU, minimal dialokasikan delapan persen dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemanfaatan untuk mendukung vaksinasi, posko di kelurahan serta insentif tenaga kesehatan daerah. Sedangkan DID, minimal dialokasikan 30 persen dari yang diterima daerah untuk bidang kesehatan.

"Kalau kita petakan prosentasenya untuk penanganan Covid-19 memang cukup besar. Tidak hanya penanganan medisnya tetapi juga aspek pencegahan termasuk vaksinasi dan dukungan operasional PPKM mikro," imbuhnya. (wia/pra/by)

Instansi
1.
2.
3.
4.

Sifat	Tindak Lanjut
Segera	☐ Untuk Ditanggapi
	☐ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005